

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

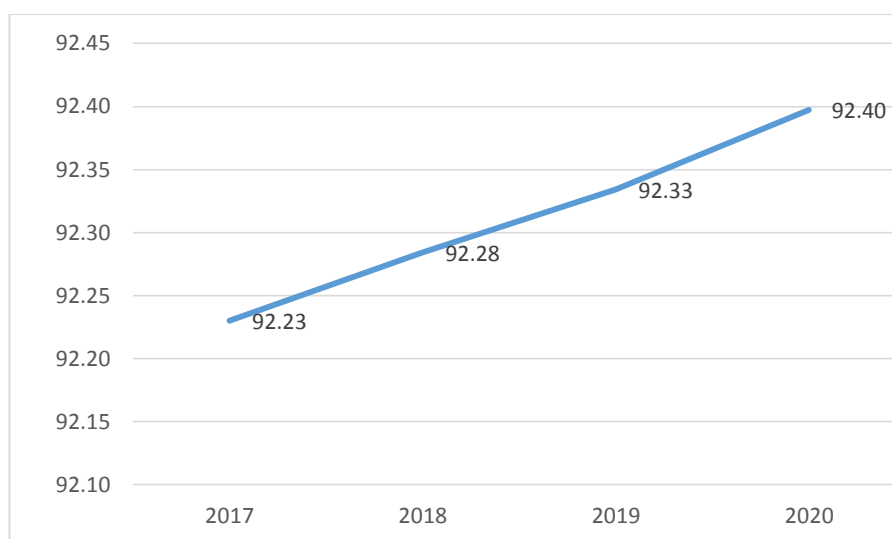
Pembangunan merupakan suatu usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan oleh suatu negara serta pemerintahan dalam rangka pembinaan suatu bangsa menuju arah yang lebih baik agar tercipta suatu kesejahteraan. Tujuan dari pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, ketidaksetaraan gender seringkali menjadi pembatas pilihan yang tersedia bagi perempuan sehingga hal tersebut juga sangat membatasi kemampuan perempuan dalam berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan (Harahap, 2014). Ketidaksetaraan gender ini akan menyebabkan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan produktivitas, efisiensi serta kemajuan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perekonomian era global sekarang ini menuntut suatu negara harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Peningkatan taraf hidup berarti juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator kesejahteraan ekonomi adalah kesetaraan, yang artinya seluruh masyarakat memiliki kesamaan untuk berpartisipasi dan dalam hal memperoleh kesempatan dan hak-haknya tidak terkecuali kaum perempuan (Arifin, 2018).

Kesetaraan dan pemberdayaan gender merupakan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, untuk itu diharapkan ketidaksetaraan gender sudah tidak terjadi lagi agar kualitas sumber daya manusia dapat meningkat tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam hal ekonomi sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi serta untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Permasalahan gender ini juga sudah diperhatikan melalui terciptanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal tersebut tentunya merupakan dorongan dari pemerintah agar upaya pemberdayaan gender segera tercapai. Dasar atau landasan penyusunan kebijakan mengenai kesetaraan gender di Indonesia terdapat pada Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yakni, "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Bangsa Indonesia yang dimaksud adalah seluruh komponen bangsa Indonesia termasuk di dalamnya hak laki-laki dan perempuan.

Indeks pembangunan yang digunakan untuk meminimalisir ketimpangan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Hariadinata (2019) IPG menjelaskan mengenai bagaimana masyarakat dapat memperoleh hasil dari adanya penyelenggaraan pembangunan yang ditujukan dalam perolehan kemudahan akses pada pendidikan, kesehatan dan juga memperoleh kehidupan yang layak. Sedangkan IDG adalah indeks yang mengukur partisipasi perempuan dalam bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Ketika nilai IPG dan IDG mendekati 100 artinya ketimpangan pembangunan gender semakin rendah. Sebaliknya, apabila nilai menjauhi 100 maka ketimpangan pembangunan gender menurut jenis kelamin semakin besar (Badan Pusat Statistik, 2020). IPG di Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2017-2020 dapat dilihat pada Grafik 1.1.

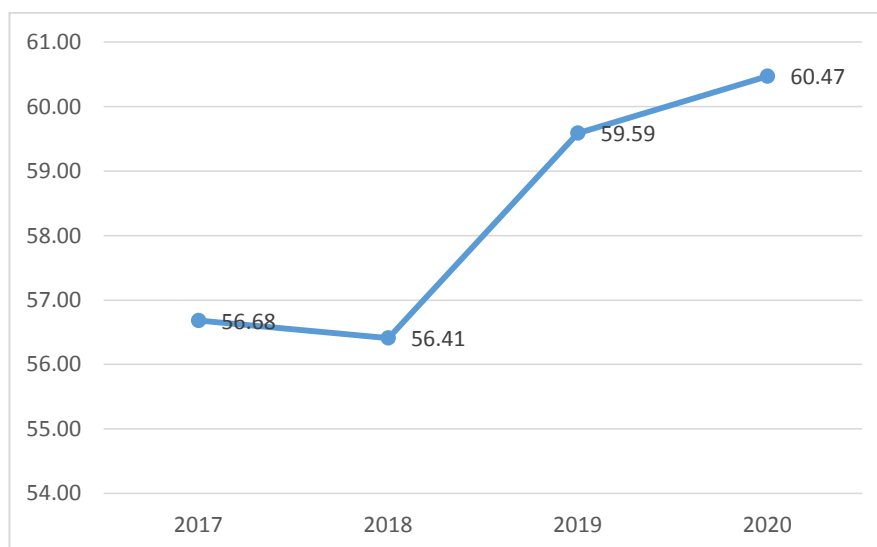


Grafik 1.1
Indeks Pembangunan Gender di Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
(Angka Indeks)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dinyatakan bahwa nilai IPG di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 dan 2018 nilai IPG sebesar 92,23 dan 92,28. Selanjutnya, pada tahun 2019 hingga 2020 nilai IPG sebesar 92,33 dan 92,40. Meskipun kenaikannya terbilang tidak terlalu signifikan tetapi nilai IPG di Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi karena mendekati 100. Maka dapat dikatakan bahwa capaian IPG di Provinsi Kepulauan Riau sudah tergolong berhasil.

Jika IPG di Provinsi Kepulauan Riau cenderung meningkat setiap tahunnya, Indeks Pemberdayaan Gender IDG justru cenderung mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat dari Grafik 1.2 sebagai berikut:



Grafik 1.2
Indeks Pemberdayaan Gender di Kepulauan Riau Tahun 2017-2020
(Angka Indeks)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.

Terlihat dari Grafik 1.2 bahwa IDG di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Penurunan nilai IDG terjadi pada tahun 2018 yang sebelumnya nilai IDG pada tahun 2017 adalah sebesar 56,68 pada tahun 2018 menjadi 56,41. Sedangkan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 nilai IDG mengalami peningkatan yaitu sebesar 59,59 dan 60,47. Terjadinya penurunan capaian IDG antar provinsi dapat dipengaruhi oleh karakteristik penduduk, kondisi sosial budaya, ekonomi serta kebijakan pada setiap daerah (Kemenpppa, 2020).

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 7 wilayah, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan

Anambas, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Menurut data Badan Pusat Statistik (2020) capaian IPG di Provinsi Kepulauan Riau sudah tergolong dalam kategori yang tinggi yaitu 92,33 dimana itu mendekati angka 100. Capaian IDG Provinsi Kepulauan Riau pada periode 2019-2020 mengalami peningkatan, namun di beberapa daerah juga masih mengalami penurunan. IPG dan IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
IPG dan IDG Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2020
(Angka Indeks)

Wilayah	IPG		IDG	
	2019	2020	2019	2020
Karimun	90,91	91,25	64,17	64,05
Bintan	93,10	93,12	69,71	69,64
Natuna	91,72	91,67	42,02	42,99
Lingga	89,26	89,25	48,96	48,52
Kepulauan Anambas	90,16	90,27	57,74	62,57
Batam	94,42	94,43	58,4	59,1
Tanjungpinang	96,77	96,79	76,13	76,44
Kepulauan Riau	92,33	92,40	59,59	60,47

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa nilai IPG pada wilayah di Provinsi Kepulauan Riau cenderung meningkat, namun terjadi penurunan di beberapa wilayah seperti Kabupaten Natuna pada tahun 2019 sebesar 91,72 turun menjadi 91,67 dan di Kabupaten Lingga pada tahun 2019 sebesar 89,26 menjadi 89,25. Capaian IPG tertinggi pada tahun 2019 dan 2020 adalah di Kota Tanjungpinang dengan angka 96,77 dan 96,79. Sedangkan nilai IPG pada periode 2019-2020 terendah adalah di Kabupaten Lingga yaitu sebesar 89,26 dan 89,25. Nilai IDG di setiap wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai yang tidak jauh dari rata-

rata IDG di Provinsi Kepulauan Riau. Namun capaian IDG di Kabupaten Natuna cukup jauh dari nilai rata-rata yakni pada tahun 2019 sebesar 42,02 dan pada tahun 2020 sebesar 42,99. Capaian IDG pada tahun 2019-2020 tertinggi terjadi di Kota Tanjungpinang dengan angka sebesar 76,13 dan 76,44 dimana angka tersebut sudah melampaui rata-rata IDG di Provinsi Kepulauan Riau.

Dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Kepulauan Riau tentu tidak luput dari peran serta kaum perempuan dan indikator lain yang menjadi acuan. Menurut Infarizki et al., (2020) acuan daripada IPG sendiri adalah dimensi pendidikan (rata-rata lama sekolah perempuan dan harapan lama sekolah perempuan), kesehatan (angka harapan hidup perempuan) serta standar kehidupan yang layak (pengeluaran perkapita disesuaikan). Sementara itu capaian IDG sendiri adalah sejauh mana peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yaitu seperti partisipasi perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga kerja manajer, profesional serta sumbangan pendapatan perempuan.

Menurut Mulasari (2015) ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain ketimpangan dari sisi kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), dari sisi pendidikan ada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan ada ketimpangan dari sisi kesempatan Kerja seperti Sumbangan Pendapatan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Dari beberapa hal tersebut menjadikan alasan peneliti untuk meneliti Indeks Pembangunan Manusia (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Perempuan dan Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan peneliti mengambil rentang waktu tahun 2017-2020. Alasan peneliti memilih hal tersebut karena sekarang ini kesetaraan gender sudah memiliki keadilan dalam pembangunan gender, bahkan peran dan kontribusi perempuan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan dan Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2020.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan dan Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan

yang tepat, terutama yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender akan membuat perempuan memiliki ruang dalam melakukan produktivitas sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam segala bidang ekonomi, budaya dan sosial. Serta meningkatkan indikator-indikator terutama dalam peningkatan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi perempuan. Dengan keberhasilannya pemberdayaan gender akan berpengaruh terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.
3. Kementerian Kesehatan, diharapkan penelitian ini menjadi masukan dalam peningkatan kesehatan terutama bagi perempuan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang dapat diakses dengan mudah di setiap daerah. Dengan adanya kesehatan yang tinggi bagi perempuan akan memudahkan perempuan melakukan aktivitas yang nantinya dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Kalangan akademisi dan peneliti lain, diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi mereka yang sedang melakukan penelitian dengan tema yang terkait tentang pengaruh indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, angka harapan hidup perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan dan sumbangan pendapatan perempuan terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau maupun di daerah lain.

E. Metode Penelitian

E.1. Alat dan Model Penelitian

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel pada 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam rentang waktu 4 tahun. Maka model ekonometrika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\log PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPG_{it} + \beta_2 IDG_{it} + \beta_3 AHH_{it} + \beta_4 RLS_{it} + \beta_5 SPP_{it} + \varepsilon_{it}$$

di mana:

<i>PDRB</i>	= Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)
<i>IPG</i>	= Indeks Pembangunan Gender (Angka Indeks)
<i>IDG</i>	= Indeks Pemberdayaan Gender (Angka Indeks)
<i>AHH</i>	= Angka Harapan Hidup Perempuan (Tahun)
<i>RLS</i>	= Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
<i>SPP</i>	= Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)
ε	= <i>Error term</i> (faktor kesalahan)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_5$	= Koefisien regresi variabel independen
<i>i</i>	= Menunjukkan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau
<i>t</i>	= Menunjukkan deret waktu 2017-2020
<i>Log</i>	= Operator Logaritma

E.2. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu gabungan dari data *time series* dengan rentang waktu 2017 hingga 2020 dan data *cross section* yang meliputi 7 Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau terhadap data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Angka Harapan Hidup Perempuan, Rata-rata Lama Sekolah Perempuan dan Sumbangan Pendapatan Perempuan. Secara umum data penelitian ini diperoleh dari Badan

Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan lain berupa jurnal ilmiah dan buku-buku teks.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas menjelaskan alat dan model analisis serta data dan sumber data. Pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menguraikan penjabaran teori yang berkaitan dengan gender dan kesetaraan gender baik secara langsung maupun melalui kebijakan-kebijakan yang memengaruhinya. Pada akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah-langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data, yang terdiri dari pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskriptif, yang berisi deskripsi perkembangan kondisi ekonomi yang diwakili oleh variabel yang ada dalam model analisis, penyajian hasil estimasi model analisis, diikuti dengan pembahasan dan interpretasi kuantitatifnya. Penutup bab ini ialah interpretasi

ekonomi, yakni uraian mengenai kondisi dan masalah ekonomi yang tersirat dalam interpretasi kuantitatif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil estimasi model analisis, ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi otoritas pembuat kebijakan ekonomi dan *stakeholder*, serta bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN